

## PENGARUH KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KOTA DEPOK

Suryanta

Program Magister Akuntansi Universitas Gunadarma Jakarta

Correspondence email: suryanta.sman11@gmail.com

Page | - 372 -

### ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis apakah kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di Kota Depok dengan periode penelitian tahun 2006 – 2015.

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis statistik regresi linier sederhana dengan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dibuktikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah (rasio kemandirian) berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Namun kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya pendapatan daerah yang semakin meningkat tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Depok. Diharapkan kota Depok lebih mengembangkan potensi yang ada sehingga mampu meningkatkan PAD agar lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, serta dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, dan mampu membuat lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

### ABSTRACT

*This study is to analyze whether the performance of regional financial management influences economic growth, unemployment and poverty in Depok City with the research period of 2006 - 2015.*

*The analytical method used is quantitative descriptive analysis and statistical analysis of simple linear regression with hypothesis testing.*

*Based on the results of hypothesis testing it can be proven that the performance of regional financial management (independence ratio) has a positive and significant effect on economic growth. Regional financial management performance has a negative and significant effect on unemployment. However, the performance of regional financial management has no significant effect on poverty. This means that increasing regional income has not been able to significantly reduce poverty in Depok. It is expected that Depok City will further develop its potential so that it can increase PAD to be more independent in financing government activities, and can make the best use of PAD to improve infrastructure procurement, and be able to create more jobs for people who do not have jobs.*

**Keywords: Financial, Performance, Growth, Unemployment, Poverty**

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah harus mengikuti prinsip secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Pengelolaan daerah yang dilakukan dengan menggunakan prinsip tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada kemajuan di daerah itu. Kegagalan atau tidak maksimalnya pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi – fungsinya akan berbuah pada kekecewaan masyarakat. Belum adanya perencanaan yang terpadu dalam pengelolaan keuangan juga merupakan salah satu penyebab kelemahan pada proses penyusunan anggaran. Kelemahan utama dari sisi kelembagaan terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit – belit (birokratis) dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan masih sangat kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berkualitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Setiap propinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia memiliki anggaran daerah yang merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Menurut UU No 32/2004 penyusunan anggaran melibatkan eksekutif dan legislatif melalui sebuah tim yang disebut panitia anggaran. Eksekutif berkewajiban membuat rancangan APBD yang akan diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam proses ratifikasi anggaran.

Halim (2007) menyatakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD guna menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas – tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran harus memuat kinerja, baik untuk

penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan akan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Menurut Boediono (1998) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2006:423). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan (Nanga, 2005: 249) serta menurunkan tingkat kemiskinan, dimana kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang baik itu kebutuhan makan maupun non makan (BPS, 2008).

Menurut Putri dan Rohman (2014) PDRB merupakan salah satu indikator umum yang dapat menggambarkan kegiatan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nilai PDRB yang tinggi dengan diikuti pertumbuhan ekonomi yang meningkat menunjukkan perekonomian daerah tersebut semakin membaik. Pemberian otonomi yang lebih besar memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong daerah untuk mengalokasikan secara efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan publik. Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan yang mantap selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa pekerjaan telah selesai.

PDRB perkapita Kota Depok atas dasar harga berlaku menunjukkan kenaikan dari Rp 10.571.847,- pada Tahun 2012 menjadi Rp 11.854.685,- pada Tahun 2013 atau meningkat 12,13 persen. Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Depok secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. PDRB perkapita Kota Depok yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan dari Rp 3.935.379,- pada Tahun 2012 menjadi Rp 4.056.982,- pada Tahun 2013 atau naik 3,29 persen.

Perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan disejumlah sektor khususnya sektor riil masih dibawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum cukup untuk menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ini dikarenakan perekonomian masih rentan terhadap kejutan (*shock*), baik karena faktor politik, sosial, kondisi negara lain serta berbagai hal lainnya. Tujuan akhir pertumbuhan ekonomi adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang melanda negara ini.

Kemerosotan yang terjadi pada sektor riil mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemerintah dituntut untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan stabil akan mendorong berkurangnya angka kemiskinan dan menekan jumlah pengangguran.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun terakhir (2013), berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2014, adalah sebesar 6,92 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya (7,15 persen). Meskipun mengalami penurunan, namun angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan rata-rata Jawa Barat (6,06). Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 ini disumbang oleh penurunan laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi serta Jasa – jasa, di samping sektor Pertanian.

Berdasarkan Data Kondisi Perekonomian Kota Depok Tahun 2011-2013, Tingkat kemiskinan Kota Depok di Tahun 2010 sebesar 2,75 % dan Tahun 2012 sebesar 2,46% dan pada Tahun 2013 sebesar 2,32% berada jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional (11,47 %) maupun Provinsi Jawa Barat (9,88 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan pada Tahun 2013 sebesar 97,68%.

Hamzah (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Hamzah, 2007). Penelitian Hamzah (2008) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian Hamzah (2008) menyimpulkan bahwa secara tidak langsung antara kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisien suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Aparatur daerah disamping itu juga dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi (Halim, 2007:232). Bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka presentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangun juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2007:234), dan rasio pertumbuhan pendapatan berfungsi dalam mengukur sejauh mana

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Halim, 2007 : 241).

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126-127).

Hasil analisis tersebut merupakan informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya (Dewi, 2007). Sesuai dengan teori keagenan yang merupakan sebuah perjanjian antara satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) dalam melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal dengan memberikan beberapa wewenang kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal dalam hal ini adalah rakyat yang diwakili oleh DPRD memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya dan dari pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang memadai yang didanai dari pendapatan daerah.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan ini kemudian dilengkapi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung secara teknis pencatatan akuntansi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar penerbitan beragam peraturan tersebut adalah untuk keseragaman perspektif dalam tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kinerja di bidang keuangan daerah diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Bentuk dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berupa pengukuran dalam rasio keuangan untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Hal ini juga disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

Analisa keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan dan APBD. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2007) yaitu rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektifitas, efisiensi, serta *debt service coverage ratio*.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan kemampuan daerah itu sendiri dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan yang berasal dari sumber lain. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan restribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan restribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

## Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah menuju keadaan yang lebih baik dalam satu periode tertentu. Dalam pengertian lain pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Jhingan (2008) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi dalam tiga cara yaitu:

1. Diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Dalam defenisi ini kelonggaran diberikan pada perubahan dalam pendapatan nasional nyata akibat pasang naik siklus dan pada perubahan dalam nilai uang serta pertumbuhan penduduk.
2. Dalam arti kenaikan pendapatan atau *output* nyata per kapita dalam jangka panjang. Defenisi ini bermaksud menekankan bahwa bagi pertumbuhan ekonomi, tingkat kenaikan pendapatan nyata seharusnya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Dari titik tilik kesejahteraan ekonomi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu proses di mana pendapatan nasional nyata per kapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

Cara yang umum digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi nasional adalah melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)*. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran yang menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dinilai prestasi kinerja pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha pengembangan

ekonomi dalam jangka panjang. Selain membandingkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, dapat juga dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara lain. Sehingga dapat mengavaluasi melalui perbandingan dengan kesuksesan negara lain dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menciptakan kesempatan kerja penuh. Pertumbuhan ekonomi dapat disebut “menggalkan” apabila tingkat yang dicapai mampu mengurangi tingkat pengangguran, paling tidak pertumbuhan ekonomi harus mampu melebihi tingkat pertumbuhan penduduk, agar pendapatan per kapita (atau taraf kemakmuran masyarakat) dapat ditingkatkan (Sukirno, 2004:56). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

## Pengangguran

Salah satu tolak ukur kemajuan ekonomi adalah tingkat kesempatan kerja. Secara nasional data menunjukkan bahwa lumpuhnya perekonomian menyebabkan meningkatnya pengangguran. Menurunnya laju perekonomian dan bertambahnya jumlah pengangguran serta meningkatnya harga konsumsi dan biaya produksi akan mengurangi kapasitas yang dihasilkan.

Samuelson dan Nordhaus (2004) mengatakan bahwa ada tiga jenis pengangguran yang berbeda yaitu:

- a. Pengangguran friksional muncul karena perpindahan orang-orang antar daerah, antar pekerjaan, antar tingkatan dari perputaran hidup. Bahkan dalam keadaan *full employment* tetap terjadi pergantian misalnya pada saat pelajar baru lulus mencari pekerjaan, atau ibu-ibu kembali ke angkatan kerja setelah melahirkan.
- b. Pengangguran struktural diakibatkan perubahan struktur komposisi perekonomian mengakibatkan permintaan atas suatu jenis keahlian meningkat sedangkan permintaan untuk jenis keahlian lainnya menurun, sedangkan penawaran tidak bisa mengimbangnya.
- c. Pengangguran *cyclical* terjadi karena turunnya kegiatan perekonomian di mana ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan agregat sehingga keseluruhan permintaan tenaga kerja rendah.

Pengangguran yang tinggi berpengaruh pada masalah ekonomi dan masalah sosial. Menjadi masalah ekonomi karena hal tersebut menyia-nyiakan sumberdaya barang dan jasa yang berharga. Pengangguran juga menjadi masalah sosial karena mengakibatkan penderitaan besar untuk pekerja yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang (Samuelson dan Nordhaus, 2004:363).

Menurut Rahardja (2008:376) defenisi ekonomi tentang pengangguran adalah angkatan kerja yang ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya.

## Kemiskinan

Adanya berbagai persepsi tentang hal apa saja yang menjadi indikator kemiskinan menyebabkan terdapat perbedaan kebijaksanaan yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut Emil Salim kemiskinan adalah suatu keadaan di mana manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan yang paling pokok seperti makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Ciri penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menurut Emil Salim adalah *Pertama*, tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang cukup, modal dan keterampilan sehingga tidak mampu menciptakan pendapatan. *Kedua*, tidak memiliki keterampilan untuk memperoleh aset produksi dengan kemampuan sendiri. *Ketiga*, tingkat pendidikan rendah, tidak tamat sekolah dasar. *Keempat*, tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah atau dengan tanah yang luasnya terbatas. *Kelima*, tinggal di kota dengan tidak memiliki keahlian sehingga tidak memiliki peluang untuk masuk sektor industri yang banyak menggunakan teknik yang tinggi.

Sedangkan menurut BPS (2012) garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Depok dengan obyek penelitian berupa kinerja pengelolaan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan dengan periode data penelitian tahun 2006 – 2015. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metoda pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan metoda deskriptif kuantitatif dan analisis statistik regresi linier sederhana.

## HASIL PENELITIAN

### Perkembangan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumberdaya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Munculnya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, adalah jawaban atas permasalahan tersebut. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur berdasarkan rasio kemandirian.

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Rasio kemandirian dapat dihitung berdasarkan total pendapatan daerah dibagi dengan bantuan pusat dan pinjaman. Pada pemerintah Kota Depok tidak melakukan pinjaman, sehingga rasio kemandirian dalam penelitian ini tidak memasukkan unsur pinjaman. Namun hanya berdasarkan pendapatan daerah serta bantuan pusat dan propinsi. Berikut ini disajikan perkembangan rasio kemandirian Pemerintah Kota Depok selama periode 2006-2015.

**Tabel 1.**

**Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Depok Tahun 2006-2015**

Tahun	PAD	Bantuan Pusat & Propinsi	Rasio Kemandirian
2006	38,385,172,874.00	323,565,000,000.00	11.86%
2007	42,395,759,461.00	392,972,000,000.00	10.79%
2008	48,456,451,986.00	434,786,387,000.00	11.14%
2009	115,720,347,455.90	542,697,274,075.00	21.32%
2010	142,380,788,621.00	416,999,054,000.00	34.14%
2011	282,747,544,886.76	572,275,845,500.00	49.41%
2012	474,705,361,540.18	745,799,945,500.00	63.65%
2013	581,207,570,935.26	809,945,417,430.00	71.76%
2014	659,173,522,492.23	889,773,680,800.00	74.08%
2015	818,204,601,264.96	938,428,216,940.00	87.19%

Sumber : Data diolah (2017)

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Ada empat macam pola hubungan (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim, 2004 : 188) yang memperkenalkan "hubungan situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, antara lain :

- 1) Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori diatas, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

**Tabel 2**

**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber :Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. (Abdul Halim, 2004 : 189)

Hasil perhitungan tentang tingkat kemandirian daerah tahun 2006 – 2015 dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3**

**Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Kota Depok Selama KurunWaktu 2006 – 2015**

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2006	11.86%	Rendah Sekali	Instruktif
2007	10.79%	Rendah Sekali	Instruktif
2008	11.14%	Rendah Sekali	Instruktif
2009	21.32%	Rendah Sekali	Instruktif
2010	34.14%	Rendah	Konsultatif
2011	49.41%	Rendah	Konsultatif
2012	63.65%	Sedang	Partisipatif
2013	71.76%	Sedang	Partisipatif
2014	74.08%	Sedang	Partisipatif
2015	87.19%	Tinggi	Delegatif
Rata-rata	43.54%	Rendah	Konsultatif

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Kota Depok mempunyai rata-rata tingkat kemandirian selama sepuluh tahun dapat dikategorikan rendah. Namun secara periodik terjadi trend yang semakin baik dengan terus meningkatnya rasio kemandirian.

## Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Pada tingkat kawasan/wilayah (regional), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pada umumnya yang termasuk dalam nilai tambah dalam suatu kegiatan produksi/jasa adalah berupa upah/gaji, laba, sewa tanah, bunga uang yang dibayarkan (berupa bagian dari biaya), penyusutan dan pajak tidak langsung (neto).

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang diukur dari sisi atas harga konstan. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian Kota Depok selama tahun 2006 – 2015 berfluktuatif tetapi cenderung ke arah yang lebih baik (tumbuh), hal ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mana menunjukkan angka yang positif. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dari tahun ke tahun.

**Tabel 3**  
**Perkembangan PDRB Kota Depok Tahun 2006-2015**

Tahun	PDRB(%)
2006	6.97
2007	7.03
2008	6.22
2009	6.22
2010	6.36
2011	6.58
2012	7.15
2013	6.93
2014	7.09
2015	9.21
Rata-Rata	6.98

## Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran

terbuka adalah adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Keadaan tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Keadaan tingkat pengangguran di Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Tingkat Pengangguran Kota Depok Tahun 2005-2016**

Tahun	Tingkat Pengangguran(%)
2006	17.33
2007	12.8
2008	10.11
2009	9.67
2010	8.34
2011	10.6
2012	9.42
2013	7.67
2014	8.44
2015	7.48
<b>Rata-Rata</b>	<b>10.19</b>

Pada tabel di atas tingkat pengangguran di Kota Depok tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan 2007 diikuti penurunan setelah tahun berikutnya.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk juga bagi pemerintah Kota Depok.

Hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Depok memperlihatkan pengaruh positif yang cenderung menurun meskipun pernah mengalami kenaikan di beberapa tahun.

**Tabel 5**

**Tingkat Kemiskinan Kota Depok Tahun 2005-2016**

Tahun	Tingkat Kemiskinan(%)
2006	2.48
2007	2.42
2008	2.69
2009	2.93
2010	2.84
2011	2.75
2012	2.46
2013	2.32
2014	2.32
2015	2.18
<b>Rata-Rata</b>	<b>2.54</b>

Page | - 384 -

Tabel 5 menunjukkan fluktuasinya tingkat kemiskinan Kota Depok dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Kota Depok sebesar 2,48%, kemudian turun menjadi 2,42% pada tahun 2007, kembali meningkat pada tahun 2008 menjadi 2,69% dan 2,93% pada tahun 2009. Adapun pada tahun-tahun berikutnya angka kemiskinan di Kota Depok terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,18% pada tahun 2015.

### Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel bebas (X) yaitu kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dalam penelitian ini diukur berdasarkan rasio kemandirian, dan variabel terikat (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), pengangguran dan kemiskinan, maka untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, penulis menggunakan bantuan program software SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) versi 23.00 dengan hasil sebagai berikut.

**Tabel 6**

**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Beta	T	Sig.	R <sup>2</sup>
Kinerja>PDRB	1.883	2.362	.046	.411
Kinerja>Pengangguran	-6.864	-2.633	.030	.464
Kinerja>Kemiskinan	-.512	-2.141	.065	.364

Dari tabel 6 tersebut dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut.

Adapun hasil hipotesa penelitian sebagai berikut :

## PEMBAHASAN

### Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Depok berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 1,883. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 1%, maka berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 1,883%. Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar  $2,362 > t_{tabel} 2,306$ , dengan tingkat signifikansinya adalah sebesar 0,046 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).  $R Square$  sebesar 0,411 yang artinya kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 41,1% dan sisanya yaitu 58,9% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi (Halim, 2007:232). Bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka presentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangun juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006).

Pengaruh variabel rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan  $p$ -value sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_{a1}$  diterima. Hal ini berarti bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan secara statistik signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Ini berarti dengan semakin besarnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah maka akan semakin mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandra (2014) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula penelitian Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kemudian Astuti (2015) membuktikan bahwa rasio kemandirian dan rasio efektivitas berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan total. Semakin meningkat porsi tersebut, maka akan mendorong dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

### Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pengangguran

Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pengangguran di Kota Depok berpengaruh negatif terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -6,864, ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 1%, maka berdampak pada turunnya tingkat pengangguran sebesar -6,864%. Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar  $-2,633 < -t_{tabel} 2,306$ ,

dengan tingkat signifikansinya adalah sebesar 0,030 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di kota Depok. *R Square* sebesar 0,464 yang artinya kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pengangguran adalah sebesar 46,4% dan sisanya yaitu 53.6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja.

Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh negatif dari kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap tingkat pengangguran dengan *p-value* sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_{a2}$  diterima. Hal ini berarti bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan secara statistik signifikan pada pengangguran. Ini berarti dengan semakin besarnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan, maka tingkat pengangguran di Kota Depok akan semakin kecil.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2008) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Pada kenyataannya dengan PAD yang tinggi tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Depok. Pendapatan daerah dapat mengurangi tingkat pengangguran karena

### **Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap kemiskinan**

Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap kemiskinan di Kota Depok berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar -0,512, ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel kinerja pengelolaan keuangan daerah sebesar 1%, maka berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan sebesar -0,512%. Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar -2,141  $> -t_{tabel}$  2,306, dengan tingkat signifikansinya adalah sebesar 0,065 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kota Depok. *R Square* sebesar 0,364 yang artinya kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap kemiskinan adalah sebesar 36,4% dan sisanya yaitu 63.6% dapat dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Depok, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program – program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Fenomena yang sering terjadi adalah pendapatan ekonomi tinggi, investasi tinggi dan belanja pemerintah juga tinggi, akan tetapi tingkat kesejahteraan

masyarakat rendah, terlihat dari angka kemiskinan yang tetap tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana implementasi pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan.

## **Pengaruh kinerja pengelolaan keuangan daerah terhadap pengangguran dan kemiskinan**

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2006:423). Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan (Nanga, 2005: 249) serta menurunkan tingkat kemiskinan, dimana kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang baik itu kebutuhan makan maupun non makan (BPS, 2008).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Depok, yang ditunjukkan dari *p-value* sebesar  $0,065 > 0,05$ . Penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Ani dan Dwirandra (2014) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Pada kenyataannya dengan PAD yang tinggi tersebut tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Depok. Pendapatan daerah tidak selalu mengurangi tingkat kemiskinan karena adanya belanja rutin daerah yang bisa saja cukup besar menyedot pendapatan daerah, sehingga menimbulkan sedikitnya penyaluran dana untuk daerah-daerah yang masih kekurangan bantuan dari pemerintah. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah pembuatan keputusan untuk pembuatan tarif pelayanan publik. Pembuatan keputusan tersebut harus mempertimbangkan faktor internal yang mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan faktor eksternal yang mempertimbangkan ekonomi sosial dan politik. Faktor ekonomi yang dipertimbangkan harus mengetahui seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membayar dan dampaknya terhadap perekonomian, dengan begitu maka meski efektivitas PAD yang semakin meningkat belum tentu bisa menyebabkan penurunan kemiskinan di daerah, sehingga pemerintah harus ekstra berhati – hati dalam memberikan keputusan terkait dengan PAD terutama pada pajak dan retribusi daerah.

## KESIMPULAN

Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Pemerintah Kota Depok selama periode tahun 2006-2015. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan akan berdampak pada semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya semakin kecil pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan maka akan pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kota Depok selama periode tahun 2006-2015. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan akan berdampak pada semakin turunnya angka pengangguran, demikian pula sebaliknya semakin kecil pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk pembangunan maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah berupa rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Depok selama periode tahun 2006 – 2015. Hal ini dapat disebabkan masih adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi di dalam masyarakat, sehingga pendapatan daerah yang semakin meningkat tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Depok.

## REKOMENDASI

Diharapkan kota Depok lebih mengembangkan potensi yang ada sehingga mampu meningkatkan PAD agar lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, serta dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, dan mampu membuat lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan rasio kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal (pemerintah Pusat/Provinsi), sehingga tingkat kemiskinan dapat diatasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Arifin dan Ghozali.2001. "Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan", Edisi Empat. Yogyakarta. BPFE.
- Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat.2008. Produk Domestik Regional Bruto Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Dedi Nordiawan dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Penerbit Brama Ardian.
- Halim, Abdul.2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

- Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur ( Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nanga, Muana. 2005. Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan, (edisi ke-2). Jakarta. PT.Raja grafindo persada.
- Ni Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.3 (2014):481-497.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahardja, Pratama dan Manurung. 2008. Teori Ekonomi Makro. Edisi Keempat. Jakarta. Lembaga Penerbit FEUI.
- Ratna Sholikhah. 2011. Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009. *Jurnal*. Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Belas Maret.
- Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Titin Kartika Putri, Boedijono, Hermanto Rohman. 2014. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Wuku Astuti. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *Jurnal EBBANK*, Vol.6, No. 1, Hal.1-18, Juli 2015.